

Politik Ekonomi Generasi Muda

Implementasi kebijakan

Gerakan Kewirausahaan Nasional

di Jawa Timur

Adimas Ramadhan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) di Jawa Timur dari segi koordinasi, siapa saja yang bertindak sebagai implementor, hambatan serta siapa yang diuntungkan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian bagaimana pengorganisasian GKN yang dilakukan Dinkop Jatim dan HIPMI di Jawa Timur yang kemudian dianalisis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Grindle.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengorganisasian GKN di Jawa Timur masih belum maksimal sehingga dampaknya pun juga tidak maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, adanya miss communication antara Dinkop dengan kementerian pusat, kredit macet yang terjadi dikarenakan jaminan yang digunakan hanyalah ijazah. Serta kurangnya minat para mahasiswa dan masyarakat dalam berwirausaha. Selain itu tidak berjalannya koordinasi antara Dinas Koperasi dengan HIPMI. Dimana MoU yang telah disepakati tidak ditindak lanjuti sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Di lain sisi HIPMI mendapat banyak keuntungan Dalam Program ini dimana HIPMI bisa bermitra dengan pemerintah sehingga mendapat prioritas dari pemerintah. HIPMI juga mendapat keuntungan secara finansial dengan mendapat bantuan dana CSR dari Semen Gresik sebagai soft loan. Sehingga dalam Program GKN ini, HIPMI yang paling diuntungkan dari segi sosial politik maupun ekonomi.

Kata Kunci: Implementasi, Gerakan Kewirausahaan Nasional, HIPMI Jawa Timur

Abstract

This study aims to determine how the implementation of the National Policy of Entrepreneurship Movement (GKN) in East Java in terms of coordination, anyone who acts as an implementor, barriers and who benefits. In conducting this study, researchers used descriptive qualitative research methods with a focus on how the organization GKN conducted Dinkop of East Java and HIPMI (Young Entrepreneur Association) of East Java were then analyzed using the Theory of Policy Implementation Grindle. From the results of this study found that the organization of GKN in East Java is still not maximized so its impact was also not optimal. This is due to several factors such as the lack of outreach to the community, a miss communication between Dinkop with central ministries, which occurred due to bad credit guaranteed used only diploma. And lack of interest of the students and the community in entrepreneurship. Besides the ineffectiveness of coordination between the Cooperative with HIPMI. Where MoU agreed not followed up so that it seems to walk on their own. On the other hand HIPMI got a lot of advantages in this program in which the Association seeks to be partnering with the government so that the priority of the government. HIPMI also benefit financially by funding assistance from Semen Gresik CSR as a soft loan. Thus, in this GKN Program, Association seeks the most benefit in terms of social, political and economic.

Keyword : Implementation, The National Policy of Entrepreneurship Movement, Young Entrepreneur Association

* Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga. email: adimas.ramadhan@yahoo.com

Pendahuluan

Indonesia termasuk salah satu negara berkembang terbesar di dunia. Dikatakan terbesar karena memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah, luas wilayah yang cukup besar, dan Sumber Daya Manusia atau jumlah penduduk yang mencapai 200 juta lebih. Oleh karenanya, untuk dapat mengatur, memanfaatkan, dan mengolah seluruhnya untuk kepentingan negara dan bangsa bukanlah perkara mudah terlebih untuk sebuah negara berkembang. Masalah-masalah seperti pengangguran dan kemiskinan adalah penyakit yang menyertai perkembangan perekonomian dan sosial suatu negara. Negara manapun baik negara maju ataupun negara berkembang tidak bisa terlepas dari masalah ini, begitu juga dengan Indonesia. Di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, persoalan pengangguran menjadi masalah serius bagi bangsa ini. Jeratan krisis ekonomi sejak 1998 serta rendahnya kualitas SDM menjadi faktor pemicu semakin tingginya jumlah pengangguran di Indonesia. Tidak hanya itu, kualitas pendidikan dan *output* yang dihasilkan juga berperan positif dalam menciptakan pengangguran terdidik, disamping persoalan sempitnya akses pendidikan tinggi dan lapangan pekerjaan tentunya.

Pengangguran terdidik yang dimaksud disini adalah kaum muda yang berada pada usia produktif seperti mahasiswa maupun sarjana yang tidak bekerja atau berpenghasilan. Tingkat pendidikan tinggi, namun lulus dengan tidak memiliki keahlian yang dapat diandalkan. Hanya sekedar lulus dan dapat sertifikat gelar sarjana saja sehingga gagal bersaing dalam bursa lowongan kerja. Disisi lain mereka tidak mampu untuk berkreasi dan hidup berwiraswasta mandiri yang pada akhirnya hanya akan menambah angka pengangguran di Indonesia sebagai sarjana pengangguran atau pengangguran intelektual. Ada pula yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi dan punya keahlian, namun tidak memiliki pengalaman bekerja. Beberapa persen di antara mereka juga gagal bersaing di bursa lowongan kerja dan menambah angka pengangguran di Indonesia. Namun sebagian mereka yang kreatif, dapat menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri (*self employee*) bahkan berkembang menjadi pengusaha yang dapat menciptakan lowongan kerja untuk orang lain.

Namun demikian kewirausahaan juga diragukan dapat menjadi solusi apabila tidak ada dukungan dari sistem ekonomi pasar yang lebih besar. Usaha-usaha mandiri apalagi yang kecil seperti UKM bisa mati apabila tidak ada industri besar dan investor besar yang menopang. Di sini

peran Pemerintah yang harus lebih signifikan, yaitu menciptakan iklim ekonomi politik yang kondusif dan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pengusaha pemula sehingga kewirausahaan dalam negeri dapat hidup.

Saat ini jumlah wirausaha di Indonesia baru sebanyak 0,24% dari total populasi penduduk, padahal untuk dapat dikatakan sebagai negara maju diperlukan setidaknya 2% jumlah wirausaha dari seluruh jumlah penduduk. Pemerintah menyadari betul kekurangan ini. Banyaknya pengangguran di usia produktif dan kurangnya wirausahawan menjadi problem yang harus segera diperbaiki, dibanahi, dan dicarikan solusinya.

Salah satunya dengan kebijakan yang dicanangkan pemerintah yaitu Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN). Kebijakan nasional ini telah dimulai sejak 2 Februari 2011. Seperti yang disampaikan Menteri Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hasan bahwa melalui GKN ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wirausaha minimal 2% dari total populasi penduduk.

Dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian bersama 13 kementerian/institusi lain mencanangkan GKN. Sebanyak 13 kementerian itu di antaranya Kementerian KUKM, Kemendiknas, Kemenperin, Kemendag, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian BUMN, Kemenbudpar, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pertanian. Berbagai upaya dilakukan untuk mendukung GKN. Seluruh kementerian bersinergi dengan BUMN, perbankan, organisasi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, Maka kebijakan ini menindaklanjuti dan berdasar pada Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Dalam Inpres tersebut mempunyai tujuan untuk Menumbuhkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang kuat kepada masyarakat, Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, handal, tangguh dan unggul, Mewujudkan kemampuan dan kemandirian para pengusaha untuk dapat menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan pengusaha kecil serta koperasi pada khususnya, dan Membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat, terutama kepada generasi muda sehingga berkemampuan menjadi wirausaha

yang handal, tangguh dan unggul.

Dari latar belakang masalah ini, maka yang perlu diteliti adalah bagaimana desain pengorganisasian dalam mendukung kebijakan Gerakan Kewirausahaan Nasional di Jawa Timur, lalu bagaimana respon HIPMI Jawa Timur terhadap Gerakan Kewirausahaan Nasional ini, dan siapa yang diuntungkan dalam Gerakan Kewirausahaan Nasional ini.

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menjelaskan desain pengorganisasian dalam hal pelaksanaan kebijakan Gerakan Kewirausahaan Nasional yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur dan juga untuk mengetahui dan menjelaskan seperti apakah respon HIPMI Jawa Timur dalam Gerakan Kewirausahaan Nasional. Selain itu juga untuk mengetahui dan menjelaskan siapa yang diuntungkan dalam Gerakan Kewirausahaan Nasional ini.

Kajian Teoritik

Dalam teori implementasi kebijakan menurut Merilee S Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi atau konteks. Menurut Grindle, Dalam tiap kebijakan membutuhkan yaitu indikator pengukuran keberhasilan, tujuan kebijakan serta program sebagai cara untuk mencapai tujuan dalam implementasi kebijakan. Selain itu, Implementasi sebagai proses politik dan administrasi dengan berisikan komponen mengenai tujuan dari kebijakan, program atau aksi kebijakan serta dana dalam pelaksanaan kebijakan. Teori implementasi kebijakan Grindle dilihat dari isi (konten) dan konteks dimana variabel isi kebijakan (konten) menyangkut Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan menyangkut sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. Kepentingan yang terpengaruh berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

Jenis manfaat yang akan dihasilkan menyangkut jenis manfaat apa yang diterima oleh target group. Dalam konten kebijakan, manfaat kebijakan berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh

pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

Derajat Perubahan yang diinginkan ialah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Kedudukan pembuat kebijakan, apakah letak sebuah program/ kebijakan sudah tepat. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Selain itu Sumber Daya yang digunakan, apakah kebijakan telah didukung sumber daya yang memadai. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Selain variabel Konten dalam teori implementasi kebijakan Grindle terdapat juga Konteks Kebijakan. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa juga sangat berpengaruh. Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Selain itu Tingkat kepatuhan dan responsivitas juga dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Selain teori, dalam penelitian ini juga menggunakan konsep kelompok kepentingan. Dalam suatu kebijakan atau program pemerintah, kepentingan dan kebutuhan rakyat dapat dipenuhi namun dapat pula terabaikan dan tidak terpenuhi. Oleh karena itu rakyat berkepentingan dan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintahnya. Kelompok kepentingan ialah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan, dan tujuan yang sepakat

mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai suatu tujuan. Sebagai kelompok yang terorganisasi mereka tidak hanya memiliki sistem keanggotaan yang jelas, tetapi juga memiliki pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan dan pola komunikasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi.

Oleh karena itu, maka HIPMI sebagai kelompok kepentingan juga memiliki posisi yang penting dalam setiap sistem politik yang ada. Namun, kelompok kepentingan seperti HIPMI tidak bisa disamakan dengan partai politik. Mereka hanya berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya, partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan publik, yaitu jabatan politik maupun pemerintah. Kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa, kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Sekalipun mungkin pemimpin-pemimpin atau anggotanya memenangkan kedudukan-kedudukan politik berdasar pemilu, kelompok kepentingan itu sendiri tidak dipandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintahan.

Kelompok kepentingan juga harus dibedakan dengan kelompok penekan. menurut Maurice Duverger pengertian kelompok penekan hampir serupa dengan kelompok kepentingan yaitu sekelompok manusia yang mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan umum atau masyarakat luas ataupun kepentingan untuk kelompok tertentu. Contoh lain persekutuan yang merupakan kelompok kepentingan, yaitu organisasi massa, paguyuban alumni suatu sekolah, dan kelompok daerah asal.

Kelompok penekan bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu "kepentingan" dengan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai didalamnya atau instansi yang berwenang maupun menteri yang berwenang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara kelompok kepentingan, partai politik, dan kelompok penekan lebih pada cara dan sasarannya masing-masing.

Berdasarkan gaya dan metode mengajukan kepentingan, HIPMI merupakan kelompok kepentingan asosiasional. Kelompok kepentingan

asosiasional ini juga meliputi serikat buruh, kamar dagang atau perkumpulan usahawan dan industrialis, paguyuban etnik, persatuan-persatuan yang diorganisir oleh kelompok-kelompok agama dan sebagainya. Secara khas kelompok ini menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, memakai tenaga profesional yang bekerja penuh dan memiliki prosedur teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan. Kelompok ini bila diijinkan untuk berkembang, cenderung dapat menentukan perkembangan dari jenis kelompok kepentingan yang lain. Basis organisasionalnya menempatkannya di atas kelompok non-asosiasional fungsi dan tujuannya sering diakui dalam masyarakat; dan dengan mewakili kelompok kepentingan yang luas, kelompok asosiasional dengan efektif bisa membatasi pengaruh kelompok anomik; non-asosiasional; dan institusional.

HIPMI disini yang masuk dalam kategori kelompok asosiasional dimana organisasi ini terorganisir secara profesional dan memiliki prosedur. Kelompok kepentingan ini merupakan sebuah himpunan pengusaha-pengusaha yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi anggotanya agar tercipta sebuah kebijakan yang berpihak pada mereka. Sebagai kelompok kepentingan HIPMI disini juga merespon atas kebijakan Gerakan Kewirausahaan Nasional. Apakah kebijakan tersebut sudah mengakomodir kepentingan-kepentingan mereka atau tidak.

Pembahasan

Temuan data dalam bab ini adalah menggambarkan data yang diperoleh di lapangan mengenai implementasi GKN di Jawa Timur. Untuk menggambarkan bagaimana implementasi GKN di Jawa Timur dapat dilihat melalui 3 rumusan masalah berikut yaitu *Pertama*, bagaimana implementasi kebijakan Gerakan Kewirausahaan Nasional di Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana komunikasi yang dilakukan antar aktor, apa saja yang menjadi hambatan terhadap program GKN dan bagaimana solusinya. *Kedua*, bagaimana respon HIPMI Jawa Timur terhadap Gerakan Kewirausahaan Nasional ini. Apakah HIPMI mampu menjadi implementor yang sehat atau malah memanfaatkan program GKN ini sebagai ajang bisnis. *Dan yang ketiga*, siapa yang diuntungkan dalam Gerakan Kewirausahaan Nasional ini.

Program GKN yang merupakan program dari menteri pusat ini melibatkan 13 instansi pusat dan dikoordinir oleh menteri pendidikan. Hal ini dijelaskan oleh Agus Muharram, Deputi Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM, menjelaskan bahwa dalam pencairan GKN ini akan melibatkan sekitar 13 instansi yang terdiri dari Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian BUMN, Kementerian Budaya dan Pariwisata, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pertanian. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Totok Indarto bahwa Program ini melibatkan 13 instansi dan dibawah langsung oleh menteri pendidikan.

Dari 13 menteri pusat tersebut akan membawahi Dinas Koperasi yang ada di setiap Provinsi sebagai implementor di setiap provinsi termasuk di Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri, Dinas Koperasi menggandeng HIPMI BPD Jatim sebagai mitra dalam implementasi Program GKN ini melalui MoU. MoU ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik. Dinkop sendiri sangat membutuhkan peran dari para entrepreneur khususnya dari HIPMI untuk menjalankan program UMKM ke masyarakat luas. Sedangkan HIPMI bisa melakukan perluasan jaringan dengan BPC HIPMI di 38 kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur. Dinkop Jatim sendiri menggandeng HIPMI untuk membantu sebagai implementor dalam mengawasi dan membimbing para pengusaha muda untuk bisa *survive* di dunia *entrepreneur*. Selain sebagai pembimbing dan pengawas Dinkop Jatim sendiri disini bertindak sebagai lembaga penyalur dana. Hal itu disampaikan oleh Totok Indarto bahwa penyaluran dana harus dari koperasi atau lembaga yang bertanggung jawab yang ditunjuk oleh menteri pusat.

Selain itu Dinkop Jatim sendiri di Jawa Timur juga bertindak sebagai koordinator yang bisa memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat terkait program GKN ini. Dinkop disini akan bekerjasama dengan HIPMI, Universitas/ mahasiswa, masyarakat dan pengusaha. Tetapi HIPMI disini akan lebih menjadi mitra atau partner dalam mengawasi, membimbing dan mengarahkan mahasiswa, masyarakat, dan pengusaha pemula agar bisa menjadi pengusaha yang matang.

Akan tetapi program ini ternyata masih belum menyebar luas di kalangan masyarakat dimana masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang adanya program ini. Komunikasi atas informasi terhadap publik Jawa Timur tentang program Gerakan Kewirausahaan Nasional ini seolah kurang

berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari apa yang telah disampaikan Totok Indarto bahwa informasi mengenai GKN ini hanya disampaikan kepada sekitar 400 masyarakat seluruh Jatim.

Temuan data diatas semakin menunjukkan menunjukkan bahwa program GKN ini masih belum berjalan secara maksimal di Jawa Timur. Banyak masyarakat atau pengusaha yang belum tahu tentang Program GKN ini disini lain dinas koperasi sendiri yang juga tidak siap sebagai implementor program GKN ini karena tidak adanya kejelasan sistem dari Kementrian Pusat serta hanya akan menjadi beban moral dan masalah ketika terjadi kredit macet karena jaminan yang digunakan hanya ijazah, seperti apa yang disampaikan Totok Indarto sebelumnya.

Tidak hanya itu masih banyak kelemahan-kelemahan program ini, yaitu bahwa usaha-usaha yang diajukan haruslah usaha yang kreatif dan inovatif. Tidak hanya itu faktor dari SDM pun juga mempengaruhi keberhasilan implementasi Program GKN tersebut dimana masih banyak masyarakat yang kurang berminat dalam menjadi *entrepreneur*. M. Agung Rizky Ketua Bidang Pengkaderan dan Organisasi HIPMI menyampaikan bahwa kendalanya bukan hanya faktor teknis seperti yang terjadi pada program kredit lunak tapi juga non teknis. Seperti mindset anak-anak muda maupun sarjana-sarjana baru saat ini

Grindle dalam teorinya menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan ditentukan oleh kontens kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut salah satunya adalah pelaksana dan sumber daya yang dikerahkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program GKN Di Jawa Timur ini melibatkan beberapa pihak antara lain Dinkop Jatim sebagai implemendor dan penyalur dana sekaligus lembaga yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam Program GKN ini dan HIPMI Jatim sebagai mitra Dinkop Jatim dalam mensosialisasi, mengawasi dan mendampingi para pengusaha muda agar bisa survive di dunia *entrepreneur*. Dinkop disini juga didukung oleh Disnaker dalam membantu menciptakan para pengusaha muda dan pemula untuk mendukung berlangsungnya program GKN ini. Selain Dinkop dan HIPMI, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan juga turut berperan serta dalam mensukseskan GKN ini. Disnaker disini berperan dalam membentuk dan

membina tenaga kerja mandiri dengan kegiatan penciptaan lapangan kerja bagi wirausaha kecil maupun wirausaha pemula lewat pendidikan kemasyarakatan produktif. Seperti yang disampaikan Drs. Widodo Kepala Bidang PPTKM (Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri) bahwa disnakertrans fokus untuk berbagai program yang dilaksanakan secara bertahap antara lain : Kegiatan bimbingan peningkatan pada penciptaan lapangan kerja bagi kader TPK, kemudian Kegiatan penciptaan lapangan kerja bagi pemula usaha melalui ketrampilan teknologi produktif sederhana, Kegiatan penciptaan lapangan kerja bagi wirausaha kecil melalui pengenalan aneka terapan, Kegiatan bimbingan peningkatan keahlian bagi Tenaga Kerja Mandiri dan Kegiatan bimbingan peningkatan kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri melalui pemberdayaan wanita terdidik. dan Kegiatan pembentukan Tenaga Kerja Mandiri melalui masyarakat terdidik di pedesaan. Selain itu disnakertrans juga beranggapan bahwa Kegiatan kewirausahaan saat ini sedang digalakkan, karena memang aktivitas kewirausahaan saat ini dirasa penting dan fundamen bagi tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi saat ini. Dan miris sekali bila melihat data yang ada dimana data yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan pelaku wirausaha sangat mencolok, apalagi bila dibandingkan dengan negara lain yang sudah maju.

Disnaker melalui kegiatan pembinaan wirausaha kecil maupun wirausaha pemula ini berharap dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak. Akan tetapi lebih dari itu Widodo juga berharap agar bagaimana setiap daerah dapat menghasilkan produk-produk unggulan agar dapat berkembang dan masuk ke pasar yang lebih luas yang pada akhirnya dengan dukungan potensi daerah dapat mendorong terciptanya desa yang produktif.

Akan tetapi pihak yang terlibat dan sumber daya yang dikerahkan disini belum cukup maksimal dalam menunjang keberhasilan Program GKN di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum tau tentang Program GKN ini bahkan salah satu anggota HIPMI Jatim sendiri. Selain itu antara mentri pusat dan Dinkop Jatim sendiri masih terdapat *miss comunnication*, terkait masalah 6 % bunga kredit dan beban moral yang ditanggung Dinkop Jatim atas ijazah yang digunakan sebagai jaminan para pengusaha dalam mendapatkan modal. Ditambah lagi dengan kesadaran masyarakat dan para mahasiswa terhadap jiwa *entrepreneur* yang

masih kurang dimana dalam mindset mereka masih tertanam jiwa seorang karyawan.

Hal ini sangat membutuhkan peran ekstra pemerintah khususnya Dinkop Jatim dan HIPMI dalam menumbuhkembangkan jiwa *entrepreneur* dalam diri masyarakat melalui sosialisasi yang berkesinambungan dan pengawasan serta pelatihan yang terpadu dan terkoordinasi. Tetapi pada kenyataannya Dinkop Jatim masih belum terlalu aktif dalam melakukan sosialisasi terbukti bahwa masih banyak masyarakat dan pengusaha yang belum tahu tentang Program GKN. Dinkop Jatim kurang dalam melakukan sosialisasi seperti apa yang dikatakan Totok Indarto bahwa Dinkop Jatim hanya memberikan seminar dan informasi kepada 400 mahasiswa di seluruh Jatim.

Sebagai organisasi sosial masyarakat yang bergerak dibidang *enterpreneur*, kerja sama dengan Dinkop Jatim tentu saja disambut positif oleh HIPMI Jawa Timur. Dengan adanya Program Gerakan Kewirausahaan Nasional ini HIPMI berupaya agar bisa menjadi mitra kerja Dinkop Jatim dalam program GKN ini. Bahkan HIPMI Jatim tampak begitu antusias menyambut kerja sama ini dimana HIPMI Jatim telah menyiapkan berbagai program dan strategi dalam upaya mensukseskan proram GKN.

M. Ali Affandi ketua HIPMI Jatim menyampaikan bahwa HIPMI akan melakukan pelatihan dan pendampingan usaha serta melakukan pengkaderan mahasiswa dan menstimulus pengusaha dengan mensinergikan setiap pengusaha, dan mahasiswa yang tergabung di HIPMI bahkan HIPMI juga berencana mendirikan HIPMI PT di Jawa Timur. Hal ini akan dilakukan HIPMI Jawa Timur untuk menunjang Program GKN dalam rangka menciptakan pengusaha muda baru yang kreatif dan inovatif. HIPMI sendiri berharap bisa menciptakan dunia *entrepreneur* untuk membantu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi angka pengangguran terdidik di Jawa Timur.

Sehingga jelas bahwa respon HIPMI di sini sangat pro aktif dalam mendukung program ini. Banyak sekali bentuk bentuk respon yang dilakukan HIPMI dalam mendukung Program GKN ini, seperti pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, menstimulus para pengusaha untuk mensinergikan usaha mereka juga memberikan seminar seminar serta menggandeng para perusahaan agar bisa memberikan bantuan dana melalui dana CSR seperti Semen Gresik. Salah satu program nyata mereka adalah Gerakan Bangga Jadi Pengusaha, melalui program HIPMI Sidoarjo

Goes to School. Tidak hanya itu saja bahkan HIPMI juga akan membentuk HIPMI Perguruan Tinggi sendiri.

Grindle menjelaskan bahwa dalam teori kebijakan publik menekankan bahwa munculnya suatu kebijakan tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang memengaruhinya. Grindle menjelaskan bahwa konteks dalam suatu kebijakan adalah tidak terlepas dari Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.

Disini terlihat adanya sedikit kekuasaan dari HIPMI dimana HIPMI mampu memengaruhi kementerian pusat untuk mengeluarkan Program GKN ini. Hal tersebut dijelaskan langsung oleh Ali Affandi bahwa salah satu inisiatif gerakan kewirausahaan nasional adalah hipmi pusat. Jadi hipmi dalam hal ini memberi masukan kepada menteri koperasi lalu dari menteri tersebut kepada presiden dan akhirnya dijadikan program nasional.

Hal ini jelas bahwa HIPMI bukan organisasi "sembarangan" karena mereka memiliki akses ke pemerintahan yang cukup kuat sehingga bisa memengaruhi pusat dalam rangka mengeluarkan Program GKN ini. HIPMI sendiri sebelumnya memang sudah memiliki kedekatan dengan pemerintrah pusat karena selalu menjadi mitra dalam setiap program ekonomi pemerintahan seperti yang disampaikan Ali Affandi bahwa HIPMI itu sudah dari dulu berpartner dengan pemerintah. Jadi setiap ada program-program HIPMI selalu diajak seperti contohnya MoU dengan dinkop itu dan HIPMI pasti mendukung.

Sebagai bentuk respon, HIPMI juga telah menyiapkan banyak strategi dan cara antara lain seperti memberikan pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, menstimulus para pengusaha, mensinergikan usaha mereka serta menggandeng para perusahaan agar bisa memberikan bantuan dana melalui dana CSR mereka serta program nyata Bangsa Jadi Pengusaha.

Sebagai organisasi sosial, HIPMI tentu merasa bahwa kerjasama dengan pemerintah tentu akan memberikan dampak yang signifikan untuk perkembangan HIPMI sendiri. Banyak sekali manfaat yang di terima HIPMI dalam program GKN ini apalagi pogram ini juga merupakan ide dari HIPMI pusat. Dibalik ini merupakan ide HIPMI pusat Jelas terdapat suatu kepentingan di dalamnya. Dan ketika ide tersebut mendapat sambutan positif dari pemerintah hal ini jelas sangat memberi banyak keuntungan karena tentunya HIPMI memiliki peluang untuk bisa merealisasikan tujuan dan kepentingan.

Selain bekerjasama dengan pemerintahan HIPMI juga mampu bekerjasama dengan BUMN

atau perusahaan-perusahaan untuk memperoleh bantuan dana CSR. Hal itu diungkapkan langsung oleh M. Ali Affandi bahwa HIPMI telah mampu menggandeng Semen Gresik untuk membantu memberikan kredit lunak. Selain itu mereka bisa mendapatkan banyak relasi para pengusaha. Hal ini diungkapkan oleh M. Ali Affandi bahwa HIPMI akan melakukan HIPMI Conection sebagai upaya mengimplementasikan Program GKN.

Dari data diatas jelas menunjukkan bahwa yang diuntungkan disini adalah HIPMI mengingat HIPMI bisa ikut berpartisipasi dalam program pemerintah langsung bahkan ini merupakan murni ide dari HIPMI pusat. Tidak hanya itu HIPMI juga bisa melebarkan sayapnya sampai ke daerah mengingat HIPMI Jatim juga yang menjadi mitra Dinkop Jatim sebagai implementor dalam Program GKN ini. Mereka bisa melakukan pengkaderan lewat universitas, masyarakat dan pengusaha sekalipun. Bahkan secara finansial mereka juga diuntungkan mengingat mereka juga mendapat bantuan dana CSR dari perusahaan seperti Semen Gresik untuk kredit lunak. Jelas banyak sekali keuntungan yang didapat HIPMI dalam Program GKN ini.

Sedangkan untuk Dinkop Jatim sendiri mereka tidak mendapatkan keuntungan justru mereka malah akan menjadi beban moral mengingat jaminan yang digunakan program ini adalah ijazah dan hanya akan menjadi masalah bila terjadi kredit macet. Selain itu mereka juga tidak jelas apakah mereka juga mendapat bagian terkait bunga 6 % dari kredit lunak. Sementara itu Program GKN di Jawa Timur sendiri juga tidak berjalan secara maksimal jelas nantinya Dinkop akan bertanggung jawab terhadap menteri pusat terkait ini merupakan tanggung jawab Dinkop sebagai implementor Program GKN di Jawa Timur. Sehingga jelas HIPMI lah yang diuntungkan dibalik Program GKN ini.

Dalam teorinya, Grindle menjelaskan bahwa dalam konten suatu kebijakan terdapat kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan menyangkut sejauh mana kepentingan kelompok tersebut termuat dalam isi kebijakan. Grindle beargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaanya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan gerakan kewirausahaan nasional ini maka dapat disimpulkan bahwa pertama,

pengorganisasian GKN di Jawa Timur ini masih belum maksimal sehingga dampak yang dihasilkan pun juga tidak maksimal. Program GKN di Jawa Timur ini melibatkan Dinkop Jatim sebagai implementor utama karena ditunjuk menteri pusat sebagai lembaga penyalur dana dan sebagai koordinator Program GKN ini. Dinkop Jatim disini bekerja sama dengan HIPMI dan Disnaker dalam membawahi beberapa elemen yaitu, universitas dan mahasiswa, masyarakat dan para pengusaha.

Bersama Dinkop, HIPMI memiliki peran dan fungsi dalam mensosialisasi, mengawasi, mendampingi dan membimbing untuk mengontrol dan mengarahkan para pengusaha muda agar bisa menjadi pengusaha yang matang dan sukses. Dan semua itu juga didukung oleh Disnaker yang berperan dalam membentuk dan membina tenaga kerja mandiri dengan kegiatan penciptaan lapangan kerja bagi wirausaha kecil maupun wirausaha pemula lewat pendidikan kemasyarakatan produktif.

Tetapi peran dan fungsi Dinkop bagi Program GKN ini masih belum terasa. Masih banyak hambatan-hambatan yang menyebabkan Program GKN ini tidak berjalan maksimal. Dari penelitian mengenai implementasi gerakan kewirausahaan nasional di Jawa Timur, penulis memiliki saran-saran kepada Dinas Koperasi Jawa Timur dan HIPMI Jawa Timur guna memaksimalkan kebijakan ini, antara lain: Bahwa dalam memaksimalkan Program GKN ini seharusnya para implementor yaitu Dinas Koperasi dan HIPMI harus melakukan sosialisasi secara berulang-ulang dan lebih mendetail tentang teknis program agar informasi tentang GKN ini lebih meluas ke masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan teknis dan miskomunikasi yang terjadi di Dinas Koperasi harusnya mereka bersikap tegas dengan melakukan koordinasi dengan kementerian pusat apabila ada kendala teknis yang belum jelas. Selain itu sebaiknya pemerintah tidak hanya menggandeng HIPMI saja tetapi juga menggandeng Organisasi lain yang bergerak dibidang ekonomi maupun sosial agar bisa lebih dikenal luas dan tidak ada unsur kepentingan tertentu.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta, Ciptoherijanto, Priyono. (1992). *Ketenagakerjaan, Kewirausahaan, dan Pembangunan Ekonomi : Analisa dan Persepsi Peneliti*

Muda. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Duverger, Maurice. (1984). *Partai politik dan kelompok-kelompok penekan*. Jakarta : PT. Bina Aksara.

Erani Yustika, Ahmad. (2009). *Ekonomi Politik : Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Grindle, Merilee. (1980). *Politics and Policy Implementation the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.

Harrison, Lisa. (2007). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta : Kencana Pernada Group.

Irawan, Andi & Putra, A Bayu. (2007). *Kewirausahaan UKM : Pemikiran dan Pengalaman*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Keller, Suzanne. (1985). *Penguasa dan Kelompok Elit : Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: CV. Rajawali.

Rachbini, Didik J. (2001). *Politik Ekonomi Menuju Demokrasi Ekonomi*. Jakarta : Grasindo.

Sanit, Arbi. (1985). *Swadaya Politik Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali.

Sumawinata, Sarbini. (2004). *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo,

Tambunan, Tulus T.H. (2003). *Perekonomian Indonesia : Beberapa Masalah Penting*. Jakarta : Ghalia Indonesia.